

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka Kecamatan Paringin menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Paringin dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan Capaian Kinerja Kecamatan Paringin Tahun 2024 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Paringin pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.


CAMAT PARINGIN
HUDI DARMAWAN. M.I.P
NIP. 19860427 200412 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paringin Tahun 2024 disusun untuk menyajikan Laporan Capaian Indikator Kinerja dan Evaluasi atas Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Paringin Tahun 2024.

Adapun Tujuan Strategis Kecamatan Paringin Tahun 2024 setelah dilakukan penyusunan kembali Pohon Kinerja dan Cascading adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi pada Kecamatan Paringin. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 adalah sebesar 85,25 dengan Rasio Capaian sebesar 99,13%.

Untuk Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dengan nilai sebesar 85,25 atau Rasio Capaian 99,13%.
- 2) Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif adalah sebanyak 94 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan Rasio Capaian 94 %
- 3) Meningkatnya Ketentramandan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani adalah sebesar 100% atau dengan Rasio Capaian 100%.
- 4) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan adalah sebesar 100% dengan Rasio Capaian 100%


5) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan adalah sebesar 100% dengan Rasio Capaian 100%.

Untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, Kecamatan Paringin melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran Kecamatan Paringin pada Tahun 2024 berjumlah Rp. 14.750.385.914,- dengan capaian realisasi Rp. 13.779.235.798,- sebesar 93,42% yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Rp. 10.086.562.174,- dengan realisasi Rp.9.505.513.518,- Sebesar 94.24%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 408.245.840,- angka realisasi Rp. 400.187.000,- sebesar 98,03%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 3.768.046.400,- realisasi Rp. 3.398.492.780,- sebesar 90,19%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 298.977.100,- realisasi Rp. 298.499.500,- sebesar 99,84%, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 188.554.400,- dengan realisasi Rp. 176.543.000,- sebesar 93,63%.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paringin Tahun 2024 ini, selanjutnya dapat dijadikan sebagai :

- a. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- b. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan periode yang akan datang.
- c. Penyempurnaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang.
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kecamatan Paringin dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.

**CAMAT PARINGIN**
HUJI DARMAWAN. M.I.P
NIP. 19860427 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum SKPD	3
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Perencanaan Kinerja.....	15
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)	15
2.1.2. Rencana Kerja (Renja).....	16
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
2.1.4. Perjanjian Kinerja (PK)	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Akuntabilitas Kinerja	24
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.1.2. Realisasi Anggaran	49
3.1.3. Analisis Kinerja Lainnya	53
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Upaya Perbaikan	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Kepegawaian ASN Kecamatan Paringin	8
Tabel 1.2. Data Kepegawaian ASN Kelurahan Paringin Kota ...	
Tabel 1.3. Data Kepegawaian ASN Kelurahan Paringin Timur .	9
Tabel 1.4. Data Kepegawaian Non ASN Kecamatan Paringin ...	10
Tabel 1.5. Data Kepegawaian Non ASN Kelurahan Paringin Kota	10
Tabel 1.6. Data Kepegawaian Non ASN Kelurahan Paringin Timur	11
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	16
Tabel 2.2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin Tahun 2024.....	17
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin Tahun 2024	20
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD Tahun 2024 ...	23
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja SKPD	24
Tabel 3.2. Ananlisis Pencapaian Tujuan Strategis	25
Tabel 3.3. Ananlisis Pencapaian Strategis I	27
Tabel 3.4. Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis I	32
Tabel 3.5. Ananlisis Pencapaian Strategis II	34
Tabel 3.6. Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis II	36
Tabel 3.7. Ananlisis Pencapaian Strategis III	39
Tabel 3.8. Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis III	41
Tabel 3.9. Ananlisis Pencapaian Strategis IV	43
Tabel 3.10. Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis IV	45
Tabel 3.11. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran 2024.....	50
Tabel 3.12. Penghargaan Yang Diperoleh Tahun 2024.....	53
Tabel 3.13. Tindak Lanjut LHE Tahun 2024	56
Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin Tahun 2024.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Kantor Kecamatan dan Karyawan (i).....	4
Gambar 1.2. Peta Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.....	4
Gambar 1.3. Peta Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ...	5
Gambar 1.4. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Paringin	7
Gambar 3.1 Pelayanan Kepada Masyarakat	33
Gambar 3.2 Sosialisasi tentang Pentingnya Peran LKD	38
Gambar 3.3 Sosialisasi Evaluasi Rembuk Stanting	38
Gambar 3.4 Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Linmas	42
Gambar 3.5 Monitoring Administrasi Perangkat Desa	47
Gambar 3.6 Pendampingan Administrasi Perangkat Desa	47
Gambar 3.7 Fasilitasi FGD Pengelolaan Keuangan Desa.....	48
Gambar 3.8 Evaluasi Raperdes Perubahan APBDes TA. 2024 .	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa regulasi yang mengatur Kecamatan dalam menjalankan roda pemerintahannya, salah satunya yaitu Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Sebagai bentuk perpanjangan tangan tersebut, maka Kecamatan Paringin menyusun Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Balangan sebagaimana tercantum pada RPJMD 2021-2026. Dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD tersebut, Kecamatan Paringin menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD selanjutnya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD atau Camat.

Pertanggungjawaban atas Rencana Renja (Renja) inilah, Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di setiap tahunnya.

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023).
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsidan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 83).

C. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai :

1. Sarana Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Paringin dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, termasuk dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

2. Bahan Penilaian dan Sarana Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja, baik Kinerja Tujuan Strategis SKPD maupun Sasaran Strategis SKPD.
3. Bahan pengambilan keputusan, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam rangka Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana Kerja dan Hasil Kerja.

D. Gambaran Umum Kecamatan Paringin

Kecamatan Paringin secara keseluruhan memiliki luas kurang lebih 100,04 Km², yang terbagi dalam 14 (empat belas) Desa dan 2 (dua) Kelurahan dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.983 jiwa. Terdiri dari Laki-Laki 9.326 jiwa dan Perempuan 8.657 jiwa (berdasarkan data Seksi Pemerintahan Semester II Tahun 2024).

Dan memiliki letak geografis yang berbatasan dengan :

1. Kabupaten Tabalong di sebelah Utara,
2. Kecamatan Paringin Selatan di sebelah Selatan,
3. Kecamatan Juai di sebelah Timur dan
4. Kecamatan Lampihong di sebelah Barat.

Secara administrasi Kecamatan Paringin terdiri dari 14 Desa, yaitu :

1. Desa Balida,
2. Desa Murung Ilung,
3. Desa Balang,
4. Desa Mangkayahu,
5. Desa Paran,
6. Desa Babayau,
7. Desa Lok Batung
8. Desa Lamida Bawah,
9. Desa Lasung Batu,
10. Desa Sungai Ketapi,
11. Desa Dahai,
12. Desa Layap,

- 13. Desa Kalahiang,
- 14. Desa Hujan Mas.

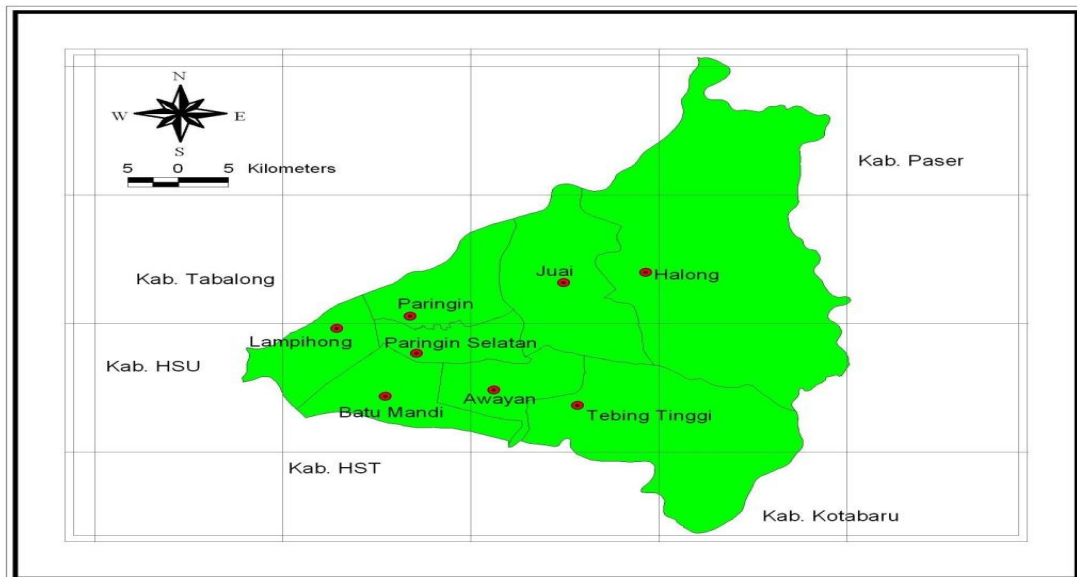
Dan untuk 2 (dua) Kelurahan yaitu :

- 1. Kelurahan Paringin Kota, dan
- 2. Kelurahan Paringin Timur.



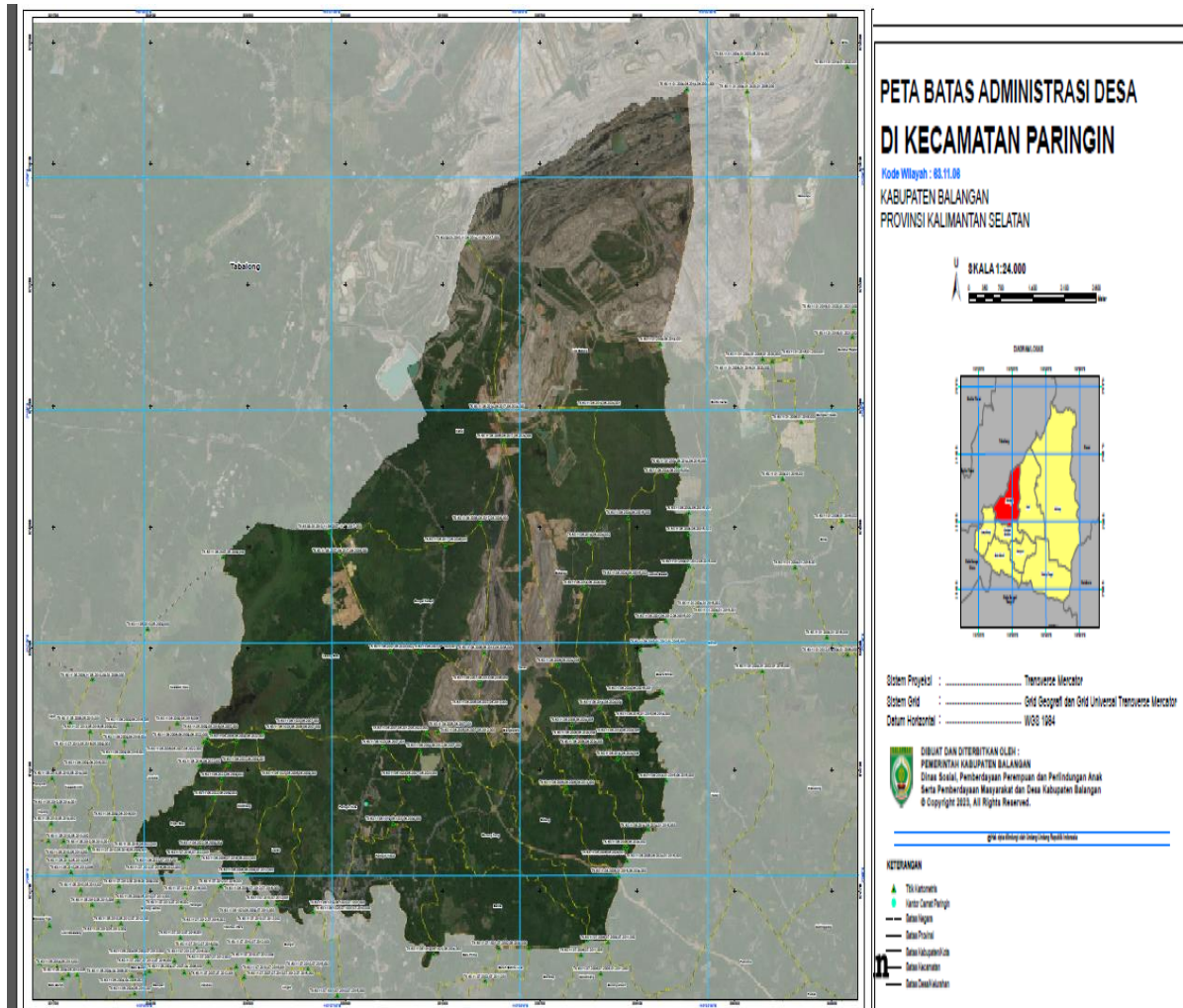
Gambar 1.1

Kantor Kecamatan Paringin dan Karyawan (i)



Gambar 1.2.

Peta Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan



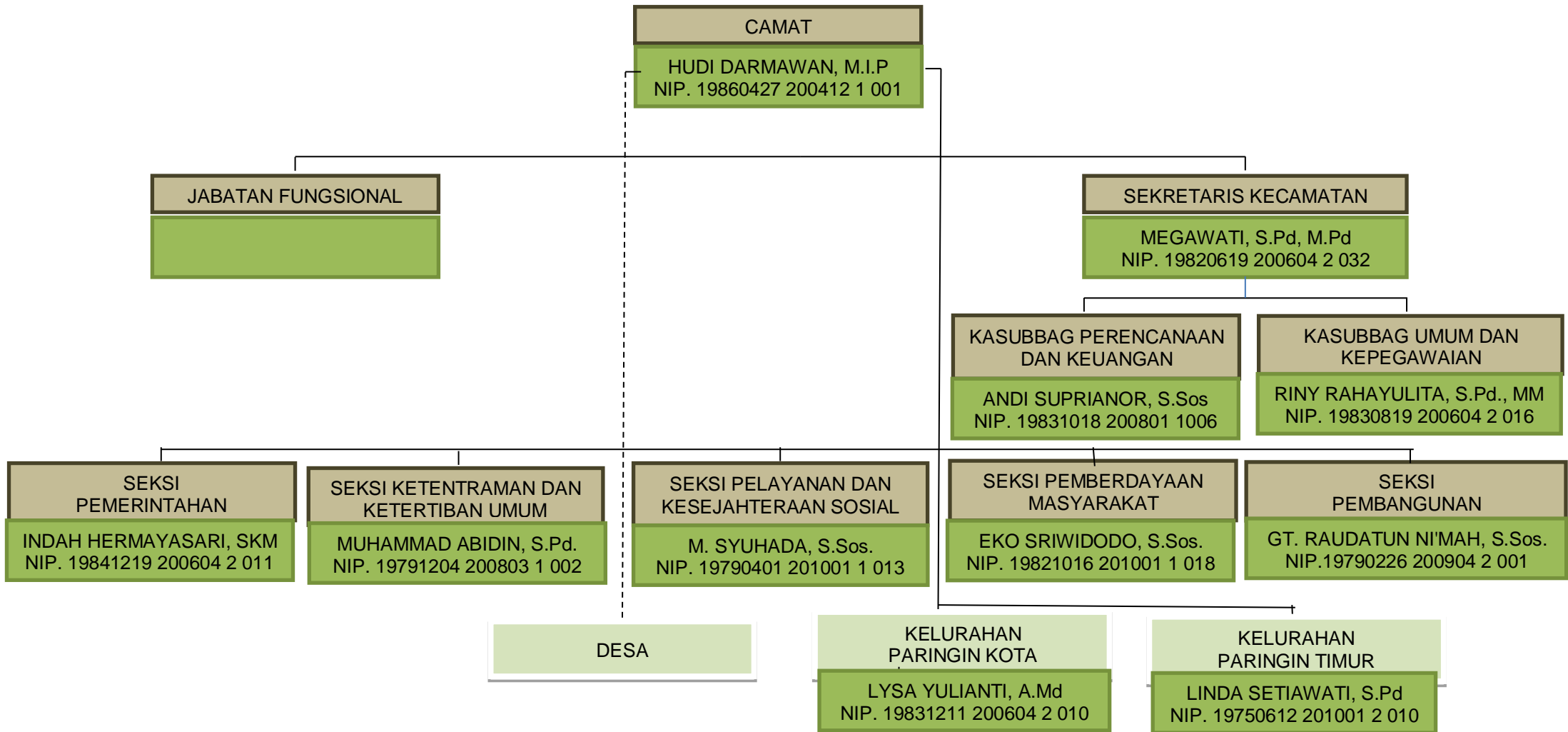
Gambar 1.3.
Peta Kecamatan Parangin Kabupaten Balangan
Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan yang dipimpin Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

6. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Di bawah ini adalah Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Paringin Tahun 2024.



Gambar 1.4.
Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Paringin

Data Kepegawaian pada Kecamatan Paringin Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Data Kepegawaian ASN Kecamatan Paringin
Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD		1			1
SMP					
SMA		2	2		4
D1					
D2					
D3					
D4					
S1			11	1	12
S2			1	2	3
S3					
JUMLAH		3	14	3	20

Tabel 1.2.
Data Kepegawaian ASN Kelurahan Paringin Kota
Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD					
SMP		1			1
SMA					
D1					
D2					

D3			3		3
D4					
S1			2		2
S2					
S3					
JUMLAH		1	5		6

Tabel 1.3.
Data Kepegawaian ASN Kelurahan Paringin Timur
Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD					
SMP					
SMA		1			1
D1					
D2					
D3			2		2
D4					
S1			3		3
S2					
S3					
JUMLAH		1	5		6

Tabel 1.4.
Data Kepegawaian Non ASN Kecamatan Paringin
Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	Masa Kerja				JUMLAH
	0-2 tahun	2-4 tahun	4-10 tahun	10 tahun keatas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD			1		1
SMP					
SMA	13	3	3	2	21
D1					
D2					
D3				1	1
D4					
S1	5		6	3	14
S2					
S3					
JUMLAH	18	3	10	6	37

Tabel 1.5.
Data Kepegawaian Non ASN Kelurahan Paringin Kota
Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	Masa Kerja				JUMLAH
	0-2 tahun	2-4 tahun	4-10 tahun	10 tahun keatas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD					
SMP					
SMA	4			1	5
D1					
D2					
D3					

D4					
S1			1	2	3
S2					
S3					
JUMLAH	4		1	3	8

Tabel 1.6.
Data Kepegawaian Non ASN Kelurahan Paringin Timur
Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	Masa Kerja				JUMLAH
	0-2 tahun	2-4 tahun	4-10 tahun	10 tahun keatas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD					
SMP					
SMA	2	1	2		5
D1					
D2					
D3				1	1
D4					
S1	3			1	4
S2					
S3					
JUMLAH	5	1	2	2	10

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paringin Tahun 2024 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan hal yang melatar belakangi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

B. Landasan Hukum

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

C. Tujuan

Menjelaskan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Paringin Tahun 2024.

D. Gambaran Umum SKPD

Menjelaskan Profil Kecamatan Paringin baik dari Letak Geografis, Tugas Organisasi sesuai Regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahannya.

E. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Menjelaskan tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paringin, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin, Renja Kecamatan Paringin dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Paringin.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan Kinerja SKPD lainnya seperti keberhasilan program, keberhasilan inovasi SKPD dan hal-hal lain yang menunjukkan peningkatan kinerja baik skala lokal, nasional dan internasional.

1. Penghargaan
2. Inovasi
3. Rencana Aksi atas LHE SAKIP tahunan dari Inspektorat

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja 2024
- 2) Penghargaan SKPD tahun 2024
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Paringin mendukung pelaksanaan Misi IV yaitu Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan Kualitas Layanan Birokrasi Pemerintahan pada Kecamatan Paringin.

A. Rencana Strategis (Renstra)

Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Paringin sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Seksi pada Kecamatan Paringin.

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut, maka ditentukan Sasaran Strategis Kecamatan Paringin, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (LKD) yang Aktif.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Di bawah ini disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Paringin berikut Indikator dan Targetnya.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			-	84	85	86	87	88
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	83	84	85	86	87	88
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	-	75	100	100	100
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin Tahun 2024

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024	
			Kinerja	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	10.086.562.174
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100%	40.776.400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.324.800
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	14.785.400
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	6 Laporan	14.666.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.651.816.844
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang / Bulan	5.651.816.844
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	213.834.500
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	213.834.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	1.682.414.500
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Paket	30.844.300
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	504.441.800
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Paket	33.172.600
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.936.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	1.107.019.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	1.251.243.200
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Disediakan	14 Unit	1.167.320.000
12	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	83.923.200

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang baik	12 Bulan	957.494.070
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	141.560.150
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	815.933.920
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100%	288.982.660
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	177.788.920
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	111.193.740
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	86 Nilai	408.245.840
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	408.245.840
17	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	152.561.540
18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	255.684.300
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	3.768.046.400
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	300.424.200
19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah LK Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	16 LK	26.404.200
20	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	2 Dokumen	31.270.000
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	242.750.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	3.269.591.800
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Laporan	1.682.519.300
23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Laporan	1.587.072.500

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	198.030.400
24	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	16 Keluarga	31.853.600
25	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	16 Keluarga	166.176.800
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	298.977.100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	298.977.100
26	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	12 Laporan	218.320.100
27	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	80.657.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	188.554.400
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Administrasinya	16 Desa/ Kel	188.554.400
28	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10.386.100
29	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	49.085.500
30	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	30.784.600
31	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	1 Dokumen	15.030.000
32	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	30.625.000
33	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa	16 Dokumen	52.643.200
JUMLAH				14.750.385.914

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin setelah dilakukannya Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading terbaru, adalah Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD. Berikut disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Paringin Tahun 2024
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p>Makna Indikator : Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tupoksinya</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan Tupoksinya</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Rata-rata Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Sumber/ Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pelayanan dan Kessos

2	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	<p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Kecamatan dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Sumber/ Referensi Indikator : AnalisaMandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi PMD
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p>Makna Indikator : Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjaga Kondusifitas Wilayah Kecamatan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100%</p> <p>Sumber/ Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p>	Kepala SKPD (Camat)	Sekdi Pemerintahan

			<p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pemerintahan dalam memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/ Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>		
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pembangunan dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/ Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pembangunan

D. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, maka Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja (PK)
Kepala SKPD 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86
02	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	100
03	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%
04	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%
05	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Selain Pertanggungjawaban Keuangan, maka Pertanggungjawaban Kinerja adalah sesuatu yang wajib untuk disampaikan oleh setiap SKPD kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Republik Indonesia melalui Bupati Balangan, dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pencapaian Kinerja berdasarkan Capaian Rata-rata atas Indikator Kinerja dibagi menjadi empat kategori, yaitu :

Tabel 3.1.
Kategori Capaian Kinerja SKPD

URUTAN	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
I	≥ 100 %	Sangat Berhasil
II	≥ 90 % < 100 %	Berhasil
III	≥80 % < 90 %	Cukup Berhasil
IV	< 80 %	Kurang Berhasil

Berikut Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Paringin Tahun 2024, yaitu :

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi

1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

Untuk Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Strategis yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.2.
Analisis Pencapaian Tujuan Strategis
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
				Target	Realisasi	Capaian						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	108,48	86	85,25	99,13%	88	96,88%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	93,42%

Indikator Kinerja dari Tujuan Strategis Kecamatan Paringin adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang merupakan Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paringin. Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja tersebut adalah baru yang ada setelah dilakukan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading pada akhir Tahun 2023, sehingga Realisasi Kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Kinerja Tujuan Utama dan Capaian Kinerja Tahun 2024 yang hampir mendekati Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial (sebagai Pengumpul Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), maka yang menjadi penyebab menurunnya Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023, adalah bahwa ada 3 (tiga) Unsur Pengukuran Kepuasan Masyarakat yang nilainya rendah pada Tahun 2024, yaitu :

1. Unsur 5, yaitu Produk Spesifikasi Jenis Layanan.
2. Unsur 6, yaitu Kompetensi Pelaksana.
3. Unsur 9, yaitu Sarana dan Prasarana

Ketiga unsur tersebut terdapat pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 3.1, maka Capaian Kinerja dari Tujuan Strategis Kecamatan Paringin untuk Tahun 2024 masuk kedalam kategori **Berhasil**.

Ada beberapa rencana aksi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis dimaksud, yaitu dengan meningkatkan nilai dari ketiga unsur di atas, berupa :

- a. Meningkatkan Kapasitas Petugas Layanan, yaitu dengan melakukan konsultasi ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan atau SKPD lainnya, serta menambah pengetahuan dengan membaca regulasi dan aturan terkait pelayanan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan Nilai Unsur 5 yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Nilai Unsur 6 yaitu Kompetensi Pelaksana.
- b. Menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang dari seluruh Seksi kepada Kepala SKPD, berupa Sarana dan Prasarana Pelayanan. Yaitu Pembangunan Ruang Laktasi maupun Penyediaan Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas. Dengan hal tersebut diharapkan Nilai Unsur 9 (Sarana dan Prasarana) bias lebih meningkat.

2) Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat

Untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis I yaitu Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.3.
Analisis Pencapaian Strategis I
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	-	108,48	86	85,25	99,13%	88	96,88%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	93,42%	Berhasil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial menunjukkan penurunan dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Paringin. IKM ini diukur melalui survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala untuk menilai kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka melalui survei dan forum publik, yang membantu dalam perbaikan layanan.

Adanya penurunan ini disebabkan keterbatasan sumber daya yang menjadi tantangan utama dalam mencapai kepuasan masyarakat yang optimal. Seperti halnya penanganan pengaduan, saran dan masukan pada survey kepuasan masyarakat masih ada yang menyatakan pada level nilai cukup, dan dalam unsur persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative masih perlu untuk

ditingkatkan, serta untuk unsur waktu pelayanan yang mana jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan masih berada pada posisi kategori cepat bukan sangat cepat.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya:

- 2022 : -
- 2023 : 108,48%
- 2024 : 99,13%

Meski ada sedikit penurunan dalam capaian dari tahun 2023 ke 2024, kinerjanya hamper mendekati target yang telah ditetapkan. Karena kegiatan – kegiatan di pelayanan lebih banyak disbanding dengan tahun 2023, yang mana ditahun 2023 kegiatan pelayanan hanya sebatas kegiatan pelayanan masyarakat yang meminta berbagai surat rekomendasi pernikahan, proposal, dan lain-lain tetapi di tahun 2024 kegiatan pelayanan dari hal tersebut ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Safari Ramadhan, persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan kegiatan pengiriman Kafilah MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Balangan, pengumpulan berkas santunan kematian dan penyerahan santunan kematian, menyalurkan bantuan-bantuan sosial dan juga menerima atau mengumpulkan pemberkasan guru keliling.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini

Dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Target akhir Renstra untuk IKM adalah 89 dengan realisasi 85,25

pada tahun 2024, capaian tersebut adalah 95,79% dari target Renstra, menunjukkan performa yang hampir terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap survey kepuasan Masyarakat yang disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan di Kecamatan Paringin sebesar 85,25 yang berada pada kategori **BAIK** dengan pencapaian pada masing-masing unsure sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan di Kecamatan Paringin berada pada kategori mutu “BAIK”. Dengan jawaban hasil survei 75% menyatakan sesuai dan 25% menyatakan sangat sesuai
2. Prosedur Pelayanan di Kecamatan Paringin berada pada kategori “BAIK”. Dengan jawaban hasil survei 73,08% menyatakan mudah dan 26,92% menyatakan sangat mudah.
3. Waktu Pelayanan di Kecamatan Paringin pada kategori “BAIK”. Yang mana jawaban hasil survei 76,92% menyatakan cepat dan 23,08 menyatakan sangat cepat.
4. Biaya/ Tarif Pelayanan di Kecamatan Paringin pada kategori mutu “SANGAT BAIK” dengan hasil survei 100% menyatakan gratis.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan di Kecamatan Paringin pada kategori mutu “BAIK”. Dengan hasil survey 73.08% menyatakan sesuai dan 26,92% menyatakan sangat sesuai.
6. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Paringin pada kategori mutu “BAIK”. Dengan hasil survei 61,54% menyatakan sesuai dan 38,46% menyatakan sangat sesuai.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Kecamatan Paringin pada ketegori mutu “BAIK”. Dengan hasil survei 57,69%

menyatakan sopan dan ramah dan 42,32% menyatakan sangat sopan dan ramah.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan di Kecamatan Paringin pada kategori mutu “BAIK”. Dengan hasil survei 03,85% menyatakan cukup, 63,46% menyatakan baik dan 32,68% menyatakan sangat baik.
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan Paringin pada kategori mutu :Sangat Baik”. Dengan hasil survei 9,62% menyatakan baik dan 90,38% menyatakan sangat baik.

Kedepannya sangat penting untuk sumber daya yang inovatif yang dapat mengembangkan dan meningkatkan suatu ide atau gagasan tentang inovasi membangun untuk peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/ Kota atau Standar Nasional

Untuk Tahun 2024, capaian IKM tidak dapat dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain atau standar Nasional karena tidak terdapat data perbandingan yang tersedia terkait hal tersebut.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

- Penyebab Keberhasilan : Suatu keberhasilan tidak terlepas dari berbagai upaya-upaya peningkatan kegiatan pelatihan dalam peningkatan Kapasitas, Peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas layanan melalui pelatihan rutin dan pembinaan. Serta ide-ide atau gagasan-gagasan oleh sipelaku pelayanan termasuk halnya dalam penumbuhan ide atau gagasan untuk berinovasi dibidang Pelayanan yang mana di tahun ini

dibidang Pelayanan sudah menjalankan inovasi LAPOR CAMAT (Layanan Respon Cepat terhadap Laporan yang terjadi di wilayah Kecamatan Paringin), inovasi EPA (Edukasi Permainan Anak) yang ada di ruang Pelayanan dan inovasi ASEP (Ada Senyum di Pelayanan) Kecamatan Paringin.

- Perbaikan Proses dan Sistem : Modernisasi dan penyederhanaan proses pelayanan dalam berbagai aspek dan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan dan penggerakan inovasi-inovasi di Pelayanan Kecamatan Paringin yaitu inovasi LAPOR CAMAT (Layanan Respon Ceperter hadap Laporan yang terjadi di wilayah Kecamatan Paringin) karena berdasarkan hasil survei pada unsure waktu pelayanan masih dinyatakan cepat bukan sangat cepat, inovasi EPA (Edukasi Permainan Anak) yang ada di ruang Pelayanan dan inovasi ASEP (Ada Senyum di Pelayanan) Kecamatan Paringin berupa pemberian reward/souvenir setelah masyarakat selesai melaksanakan urusannya di pelayanan.
- Umpan Balik Masyarakat : Penggunaan survei dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat guna melakukan perbaikan layanan.
- Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja :
Kurangnya Sumber Daya, beberapa program mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas.
- Birokrasi dan Kebijakan : Proses birokrasi yang masih kompleks menghambat kelancaran pelaksanaan pelayanan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- Peningkatan dan penggerakan inovasi-inovasi di Pelayanan Kecamatan Paringin yaitu inovasi LAPOR CAMAT (Layanan Respon Cepat terhadap Laporan yang terjadi di wilayah Kecamatan Paringin), inovasi EPA (Edukasi Permainan Anak) yang ada di ruang Pelayanan dan inovasi ASEP (Ada Senyum di Pelayanan) Kecamatan Paringin.
- Optimalisasi Teknologi: Implementasi system informasi manajemen untuk mempercepat proses pelayanan.
- Kerjasama dan Kolaborasi : Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik.
- Pengawasan dan Evaluasi : Melakukan monitoring berkala dan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk memastikan efisiensi dan efektivitas layanan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Anggaran dalam mencapai target kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.
Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis I
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	86 Nilai	85,25 Nilai	99,13%	152.561.540	152.056.100	99,67%	-0,55%	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.152.561.540,- terealisasi Rp. 152.056.100,- artinya, penggunaan anggaran ini sudah lebih dari cukup, dan

menghasilkan efisiensi anggaran sebesar -0,55%. Efisiensi ini juga mencerminkan bahwa anggaran yang terpakai sedikit lebih rendah dari yang dialokasikan, target kinerja tercapai dengan capaian yang tinggi, yaitu 99,13%. Ini menunjukkan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang mendekati target.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Serapan Anggaran dalam rangka mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 99,67%. Yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 152.056.100,- dengan Pagu Anggaran Rp. 152.561.540,-.

Dibawah ini adalah salah satu dokumentasi dari kegiatan pada Seksi Pelayanan :



Gambar 3.1
Pelayanan Kepada Masyarakat

3) Meningkatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis II yaitu Meningkatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.
Analisis Pencapaian Strategis II
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian							
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	81%	100	94	94%	100	94%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	98,24%	Berhasil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (LKD) yang aktif menunjukkan peningkatan yang signifikan. LKD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Pemerintah telah mengadakan berbagai pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota LKD. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa yang mendukung kegiatan LKD, seperti balai desa, ruang pertemuan, dan fasilitas lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar LKD.

Realisasi Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (LKD) yang Aktif pada Tahun 2024 adalah sebanyak 94 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dari target 100 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), atau dengan Rasio Capaian Kinerjanya adalah 94%. Adapun jenis LKD yang ada di wilayah Kecamatan Paringin yaitu 1. Rukun

Tetangga (RT) yang disetiap Desa terdiri dari 2 atau 3 atau 4 RT, dan untuk Kelurahan Paringin Timur 13 RT dan Paringin Kota 18 RT. 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) disetiap desa dan kelurahan. 3. Karang Taruna juga ada disetiap desa dan kelurahan. 4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ada 1 atau 2 Posyandu di setiap desa dan juga di Kelurahan. 5. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan yang ada disetiap desa. 6. FAD (Forum Anak Desa) yang juga sudah ada/dibentuk oleh desa. 7. Perlindungan Masyarakat (LINMAS). 8. POKTANI (Kelompok Tani). 9. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang ada di Desa Balida.

- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022

Tahun 2023 : Capaian 81,33% atau 61 aktif dari target 75 LKD.

Tahun 2024 : Tercapai jumlah 94 LKD aktif dari target 100 yang ditargetkan. Ini artinya, ada peningkatan dari tahun 2023 di mana kini semua target hampir tercapai.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja dampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Dalam Rencana Strategis (Renstra), target akhir adalah untuk mengaktifkan 100 LKD yang ada. Dengan realisasi kinerja tahun 2024 yaitu 94 LKD aktif dari 100 yang ditargetkan, maka hampir mencapai target sepenuhnya, yakni 94%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan untuk mengaktifkan LKD sesuai perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/ Kota atau Standar Nasional (jika ada)

Untuk Rasio Capaian terhadap Kabupaten/ Kota Lain di Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun RPJMN, tidak bisa ditampilkan. Hal ini disebabkan tidak adanya data pembanding dimaksud.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Implementasi strategi dan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan LKD telah membantu hampir mencapai target yang ditentukan, pengawasan yang rutin dan evaluasi berbasis capaian telah memastikan bahwa target yang ingin dicapai bisa selalu terpantau dan disesuaikan jika diperlukan.

Keterlibatan yang aktif dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat desa sangat berkontribusi terhadap aktifnya LKD.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Penguatan Kapasitas LKD, telah dilakukan penguatan kapasitas sumber daya dan kemampuan lembaga untuk memelihara tingkat partisipasi aktif, menerapkan mekanisme monitoring yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan aktifnya LKD, mendorong keaktifan LKD dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Anggaran dalam mencapai target kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.
Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis II
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
2	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	100 LKD	94 LKD	94%	440.780.400	433.020.200	98,24%	-4,51%	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada sasaran ini, dari total anggaran sebesar Rp.440.780.400,- terealisasi sebesar Rp.433.020.200,- menghasilkan efisiensi anggaran sebesar -4,51%. Anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat berhasil digunakan dengan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan. Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif hampir tercapai sesuai target, memperlihatkan pengelolaan yang baik dan efisien dari dana yang tersedia.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 98,24%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 433.020.200,- dengan Pagu Anggaran Rp. 440.780.400,-

Dibawah ini adalah salah satu dokumentasi dari kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat :



Gambar 3.2
Sosialisasi tentang Pentingnya peran LKD
Kecamatan Paringin



Gambar 3.3
Sosialisasi Evaluasi Rembuk Stunting
Kecamatan Paringin

4) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

Untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis III yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7.
Analisis Pencapaian Strategis III
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Wilayah Kecamatan**

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi / Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian							
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	99,84%	Berhasil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Di tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan mencapai 100% dalam menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Capaian realisasi kinerja ini juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yakni 100%. Jadi, kinerja pada tahun ini bisa dikatakan berhasil mencapai target yang telah direncanakan secara keseluruhan. Dengan berbagai Upaya yang dilakukan terutama dalam peningkatan kafasitas LINMAS di Kelurahan Paringin Timur dan Kota dan juga LINMAS di Desa-desa.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tahun 2023 : Capaian kinerja untuk tahun 2023 juga mencapai 100%. Di sini dapat dilihat konsistensi dalam penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman umum. Selain hal yang disebutkan tadi, upaya peningkatan keamanan dibidang keamanan dan ketertiban mempunyai 2 inovasi yaitu

Kudapanmas dan Sinarmas. Kudapanmas adalah Inovasi ini fokus pada data kependudukan dan perlindungan masyarakat. Sedangkan Sinarmas Inovasi ini fokus pada laporan kegiatan linmas. Yang mana pada tahun 2024 ini untuk linmas mendapatkan penghargaan juara 1 lomba baris berbaris linmas yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Balangan.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Dalam Rencana Strategis (Renstra), target akhir adalah mencapai 100% dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yang juga mencapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja ini telah memenuhi ekspektasi strategis jangka menengah.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/ Kota atau Standar Nasional

Untuk Rasio Capaian terhadap Kabupaten/ Kota Lain di Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun RPJMN, tidak bias ditampilkan. Hal ini disebabkan tidak adanya data pembanding dimaksud.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Konsistensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan menunjukkan upaya yang berkelanjutan dan terencana dengan baik, pemberlakuan strategi yang efektif dalam menangani gangguan ketertiban dan ketentraman umum sangat mempengaruhi capaian 100% ini.

Alternatif solusi yang telah diterapkan, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan membantu menjaga pencapaian target, penguatan kerjasama antara aparat keamanan, pemerintah kecamatan, dan masyarakat dalam menangani

gangguan juga berperan penting dalam mencapai kinerja yang optimal.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Anggaran dalam mencapai target kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8.
Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis III
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Wilayah Kecamatan

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%	298.977.100	298.499.500	99,84%	0,16%	1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Untuk sasaran ini, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.298.977.100,- terealisasi Rp.298.499.500,-. Hal ini berarti efisiensi anggaran mencapai 0,16 %. Capaian kinerja 100% menunjukkan bahwa semua gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi ditangani sepenuhnya dengan penggunaan anggaran yang cukup dari yang dianggarkan.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.0004	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 99,84%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 298.499.500,- dengan Pagu Anggaran Rp. 298.977.100,-.

Dibawah ini adalah dokumentasi dari kegiatan pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum :



Gambar 3.4
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Linmas
Se Kecamatan Paringin

5) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9.
Analisis Pencapaian Strategis IV
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian							
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	92,84%	Berhasil
5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	94,79%	Berhasil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 menargetkan kinerja 100% dalam dua indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Keuangan :

Target : 100%

Realisasi : 100%

Ini berarti, realisasi kinerja tahun 2024 telah berhasil mencapai target dengan hasil 100%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Pada Tahun 2023 Kedua indikator mencapai 100% yang menunjukkan bahwa pada 2023 seluruh Desa juga telah mentertibkan administrasi pemerintahan dan keuangan dengan baik. Kemudian pada Tahun 2024 Kedua indikator juga mencapai target yang menyatakan bahwa kinerja telah dipertahankan secara konsisten.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Target akhir Renstra untuk kedua indikator ini adalah 100%. Realisasi kinerja pada 2024 kedua indikator adalah Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan : 100%, dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan : 100%. dengan demikian, capaian ini menunjukkan bahwa target Renstra berhasil dicapai, oleh karena itu kinerja ini telah memenuhi ekspektasi strategis jangka menengah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Kabupaten/ Kota atau Standar Nasional

Untuk Rasio Capaian terhadap Kabupaten/ Kota Lain di Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun RPJMN, tidak bisa ditampilkan. Hal ini disebabkan tidak adanya data pembanding dimaksud.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian Indikator Persentase Desa Yang tertib Administrasi Pemerintahan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas administrasi di tingkat desa serta partisipasi aktif dari masyarakat desa. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop bagi aparatur desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola administrasi yang baik dan benar. Pengembangan modul-modul pelatihan yang berbasis pada kebutuhan spesifik desa.

Penguatan Sistem Informasi Desa : Implementasi sistem informasi desa yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data dan dokumen administrasi, adapun Hambatan Kekurangan jumlah aparatur desa yang kompeten

dan berpengalaman menjadi salah satu tantangan utama dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Beberapa desa masih mengalami kendala dalam mengakses teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan administrasi secara digital, masalah jaringan internet yang tidak stabil.

Sedangkan untuk indikator persentase Desa yang tertib Administrasi Keuangan merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas administrasi keuangan di tingkat desa, Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop bagi aparatur desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola administrasi keuangan yang baik dan benar, Implementasi sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data dan dokumen administrasi keuangan, melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan administrasi keuangan di desa untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Anggaran dalam mencapai target kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis IV
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%	112.114.800	104.083.800	92,84%	7,16%	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	76.439.600	72.459.200	94,79%	5,21%	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk indikator tertib Administrasi Pemerintahan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.112.114.800,- dari jumlah anggaran, yang terealisasi sebesar Rp.104.083.800,- menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 7,16 %. Sedangkan untuk indikator tertib Administrasi Keuangan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.76.439.600,- yang terealisasi sebesar Rp.72.459.200,- menghasilkan efisiensi anggaran 5,21 %. Meskipun ada sedikit penghematan dalam realisasi anggaran, capaian kinerja tetap 100%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang dilakukan sangat efisien dalam mencapai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, efisiensi anggaran mencerminkan penggunaan dana yang lebih hemat dari yang dialokasikan tanpa mengurangi capaian kinerja yang ditargetkan. Ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik dan efektif dalam mencapai target tujuan.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas untuk Indikator Tertib Administrasi Pemerintahan adalah :

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 92,84%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 104.083.800,- dengan Pagu Anggaran Rp. 112.114.800,-.

Dibawah ini adalah salah satu dokumentasi dari kegiatan pada Seksi Pemerintahan :



Gambar 3.5
Monitoring Administrasi Perangkat Desa
Kecamatan Paringin



Gambar 3.6
Pendampingan Administrasi Perangkat Desa
Kecamatan Paringin

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis untuk Indikator Tertib Administrasi Keuangan adalah :

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANP EMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 94,79%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 72.459.200,-dengan Pagu Anggaran Rp. 76.439.600,-.

Dibawah ini adalah salah satu dokumentasi dari kegiatan pada Seksi Pembangunan :



Gambar 3.7
Fasilitasi FGD Pengelolaan Keuangan Desa
Se Kecamatan Paringin



Gambar 3.8
Evaluasi Raperdes Perubahan APBDes TA. 2024
Kecamatan Paringin

3.1.2. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Kecamatan Paringin pada Tahun 2024 yang digunakan untuk mendukung Pencapaian Indikator Kinerja, sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 3.1.1 di atas berjumlah Rp. 14.750.385.914,- yang meliputi Belanja Pegawai Rp. 5.651.816.844,- Belanja Barang Jasa Rp.6.470.508.670,- dan Belanja Modal Rp. 2.628.060.400,- Adapun seluruh Anggaran yang berhasil direalisasikan adalah Rp. 13.779.235.798,- atau sekitar 93,42%.

Berikut adalah data perbandingan antara Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024, yaitu :

Tabel 3.11.
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Sisa Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.086.562.174	9.505.513.518	94,24	581.048.656
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.776.400	38.975.600	95,58	11.324.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.324.800	10.323.200	91,16	1.001.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	14.785.400	14.754.400	99,79	31.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.666.200	13.898.000	94,76	768.200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.651.816.844	5.282.148.276	93,46	369.668.568
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.651.816.844	5.282.148.276	93,46	369.668.568
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	213.834.500	213.378.800	99,79	455.700
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	213.834.500	213.378.800	99,79	455.700
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.682.414.500	1.664.755.731	98,95	17.658.769
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.844.300	30.807.900	99,88	36.400
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	504.441.800	488.069.000	96,75	16.372.800
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	33.172.600	33.164.400	99,98	8.200
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.936.000	6.888.000	99,31	48.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.107.019.800	1.105.826.431	99,89	1.193.369
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.251.243.200	1.135.376.500	90,74	115.866.700
11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	1.167.320.000	1.059.080.000	90,73	108.240.000
12	Pengadaan Mebeuler	83.923.200	76.296.500	90,91	7.626.700

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.494.070	900.051.622	94,00	57.442.448
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.560.150	111.575.422	78,82	29.984.728
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	815.933.920	788.476.200	96,63	27.457.720
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.982.660	270.826.989	93,72	18.155.671
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.788.920	160.999.989	90,56	16.788.931
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.193.740	109.827.000	98,77	1.366.740
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	408.245.840	400.187.000	98,03	8.058.840
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	408.245.840	400.187.000	98,03	8.058.840
17	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	152.561.540	152.056.100	99,67	505.440
18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	255.684.300	248.130.900	97,05	7.553.400
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.768.046.400	3.398.492.780	90,19	369.553.620
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	300.424.200	290.972.600	96,85	9.451.600
19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.404.200	23.892.600	90,49	2.511.600
20	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	31.270.000	28.450.000	90,98	2.820.000
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	242.750.000	238.630.000	98,30	4.120.000
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.269.591.800	2.913.129.980	89,10	356.461.820
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.682.519.300	1.545.761.500	91,87	136.757.800
23	Pemberdayaan Masyarakat	1.587.072.500	1.367.368.480	86,16	219.704.020

11	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	198.030.400	194.390.200	98,16	3.640.200
24	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	31.853.600	30.069.800	94,40	1.783.800
25	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	166.176.800	164.320.400	98,88	1.856.400
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	298.977.100	298.499.500	99,84	477.600
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	298.977.100	298.499.500	99,84	477.600
26	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	218.320.100	218.114.500	99,91	205.600
27	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.657.000	80.385.000	99,66	272.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	188.554.400	176.543.000	93,63	12.011.400
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	188.554.400	176.543.000	93,63	12.011.400
28	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.386.100	10.346.100	99,61	40.000
29	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	49.085.500	46.025.500	93,77	3.060.000
30	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.784.600	30.698.200	99,72	86.400
31	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.030.000	11.796.000	78,48	3.234.000
32	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	30.625.000	29.965.000	97,84	660.000
33	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	52.643.200	47.712.200	90,63	4.931.000
TOTAL		14.750.385.914	13.779.235.798	93,42	971.150.116

3.1.3. Analisis Kinerja Lainnya

1. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Prestasi ini diberikan sebagai pengakuan atas inovasi dan efektifitas dalam menjalankan program-program yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penghargaan tersebut mencerminkan keunggulan SKPD dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus berupaya mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Tabel 3.12.
Penghargaan Yang Di Peroleh Pada Tahun 2024

No	Tahun	Tempat	Penghargaan	Oleh
1	2024	Kecamatan Paringin	Juara Favorit Menu keluarga Lomba Masak Serba Ikan (LMSI) Tingkat Kabupaten Tahun 2024	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten dan TP. PKK Kabupaten Balangan
2	2024	Kecamatan Paringin	Desa Mangkayahu sebagai Juara 1 pada Lomba Desa Tingkat Kabupaten	DP3APPKBPMMD Kabupaten
3	2024	Kecamatan Paringin	Kelurahan Paringin Kota sebagai Juara 1 pada Lomba Poskamling Tingkat Kabupaten dan Juara 2 Lomba Poskamling Tingkat Provinsi	Satpol PP Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan
4	2024	Kecamatan Paringin Selatan	Muhammad Abidin, S.Pd Sebagai Pamong Inovasi dalam Ajang Innovative Government Award (IGA) Tingkat Kabupaten	Bapperida Kabupaten
5	2024	Kecamatan Halong	Sebagai Juara 3 Pawai Ta'aruf pada MTQ Nasional ke XVII Tingkat Kabupaten	LPTQ Kabupaten

Pada tahun 2024, Kecamatan Paringin berhasil meraih lima penghargaan yang memperkuat reputasi kecamatan ini sebagai wilayah yang berprestasi dan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

1. Juara Favorit Lomba Masak Serba Ikan (LMSI) Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2024 Penghargaan ini diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang berkolaborasi dengan TP. PKK Kabupaten Balangan Menyenggarakan kegiatan Lomba Masak Serba Ikan.

2. Desa Mangkayahu sebagai Juara 1 pada Lomba Desa Tingkat Kabupaten Balangan yang dilaksanakan oleh DP3APKBPMMD Kabupaten Balangan.

3. Kelurahan Paringin Kota sebagai Juara 1 pada Lomba Poskamling Tingkat Kabupaten dan Juara 2 Lomba Poskamling Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Muhammad Abidin, S.Pd Sebagai Pamong Inovasi dalam Ajang Innovative Government Award (IGA) Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Balangan.

5. Kafilah Paringin Sebagai Juara 3 Pawai Ta'aruf pada MTQ Nasional ke XVII Tingkat Kabupaten Balangan yang dilaksanakan di Kecamatan Halong oleh LPTQ Kabupaten Balangan.

2. Inovasi

Pada tahun 2024, Kecamatan Paringin juga ikut serta dalam Lomba Inovasi Daerah, menampilkan beberapa inovasi unggulan yang diinput melalui Aplikasi Sistem Informasi Inovasi Daerah (SINOVDA) Kabupaten Balangan. Inovasi-inovasi tersebut meliputi :

1. **Lapor Camat (Layanan Respon Cepat terhadap Laporan di Wilayah Kecamatan Paringin)**. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
2. **Kudapanmas (Kumpulan Data Kependudukan dan Linmas)**. Inovasi ini fokus pada data kependudukan dan perlindungan masyarakat.
3. **Sibasos (Sistem Informasi Bantuan Sosial)**. Inovasi ini fokus pada data penerima bantuan sosial.
4. **Epa (Edukasi Permainan Anak)** Inovasi ini ada pada seksi pelayanan dan kesejahteraan sosial.
5. **Sipa Bermedsos (Sistem Informasi Pelaporan APBDes Berbasis Media Sosial)** Inovasi ini fokus pada data laporan anggaran Desa.
6. **Simika (Sistem Informasi Monitoring Keuangan Desa)**. Inovasi ini fokus pada data laporan keuangan Desa.
7. **Sinarmas (Sinergitas Kegiatan Linmas)**. Inovasi ini fokus pada laporan kegiatan linmas.
8. **Sifakab (Sistem Informasi Administrasi Kinerja BPD)**. Inovasi ini fokus pada laporan administrasi BPD.
9. **Asep (Ada Senyum di Pelayanan)**. Inovasi ini fokus pada SOP pelayanan kepada masyarakat.
10. **Tebas (Tertib Berkas SPj)** Inovasi ini fokus pada administrasi keuangan.

Inovasi-inovasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen Kecamatan Paringin terhadap peningkatan layanan publik, tetapi juga menggambarkan dedikasi dalam menciptakan solusi inovatif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3. Rencana Aksi atas LHE SAKIP tahunan dari Inspektorat

Adapun terkait dengan Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, maka Kecamatan Paringin menindaklanjuti hal tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perencanaan		
1	Agar Membuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/ Sasaran yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai seperti meningkatnya, terciptanya, terwujudnya, dan sebagainya)	Membuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/ Sasaran yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai seperti meningkatnya, terciptanya, terwujudnya, dan sebagainya)
2	Agar Membuat diagram Crosscutting	Membuat diagram Crosscutting
3	Agar Menambahkan informasi mengenai langkah perbaikan terhadap kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya pada Dokumen Renja	Menambahkan informasi mengenai langkah perbaikan terhadap kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya pada Dokumen Renja
Pengukuran Kinerja		
1	Membuat jadwal / dokumentasi kegiatan pengukuran kinerja setiap triwulan	Membuat jadwal/ dokumentasi kegiatan pengukuran kinerja setiap triwulan
2	Agar Menambahkan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)	Menambahkan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
3	Agar Membuat laporan pengukuran kinerja triwulan di Internal SKPD	Membuat laporan pengukuran kinerja triwulan di Internal SKPD
Pelaporan Kinerja		

1	Memuat informasi perbandingan target dan realisasi atas capaian kinerja tahun evaluasi dan tahun tahun-tahun sebelumnya (n-2) dan seterusnya selama 1 periode RPJMD/ Renstra pada Dokumen Laporan Kinerja Internal Pemerintahan (LKjIP)	Memuat informasi perbandingan target dan realisasi atas capaian kinerja tahun evaluasi dan tahun tahun-tahun sebelumnya (n-2) dan seterusnya selama 1 periode RPJMD/ Renstra pada Dokumen Laporan Kinerja Internal Pemerintahan (LKjIP)
2	Agar kedepannya Dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) Memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD dengan data realisasi capaian antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) Memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD dengan data realisasi capaian antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
3	Agar Menambahkan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran dengan perhitungan $(100\% - (\text{Realisasi Anggaran})/(\text{Target Anggaran}) \times 100\%)$ pada Dokumen LKjIP	Menambahkan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran dengan perhitungan $(100\% - (\text{Realisasi Anggaran})/(\text{Target Anggaran}) \times 100\%)$ pada Dokumen LKjIP
4	Agar Menambahkan informasi gambaran umum mengenai target kinerja dan anggaran dengan realisasinya dari pegawai (berkaitan Seksi, JF dan pelaksanaannya terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)	Menambahkan informasi gambaran umum mengenai target kinerja dan anggaran dengan realisasinya dari pegawai (berkaitan Seksi, JF dan pelaksanaannya terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1	Agar Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya	Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas LHE SAKIP Tahun Sebelumnya

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum Capaian Kinerja Kecamatan Paringin Tahun 2024 masuk Kategori Berhasil, hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Rasio Capaian Kerjanya hampir bahkan ada yang 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Paringin Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi / Capaian Terhadap Kab/Kot	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	108,48%	86	85,25	99,13%	88	96,88%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	99,67%
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	81,33%	100	94	94,00%	100	94,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	98,24%
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	99,84%
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	92,84%
5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	94,79%

4.2. Upaya Perbaikan

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki LKIP kedepannya :

1. Peningkatan Kualitas Data :
 - Melakukan validasi dan verifikasi data yang digunakan dalam LKIP.
 - Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan.
2. Penggunaan Indikator Kinerja yang Tepat:
 - Menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
3. Peningkatan Mekanisme Pelaporan:
 - Mengembangkan template laporan yang standar dan mudah dipahami.
 - Menggunakan perangkat lunak manajemen kinerja untuk membantu dalam penyusunan dan pelaporan LKIP.
4. Evaluasi dan Umpan Balik Berkala:
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja yang telah dicapai dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
 - Mengadakan sesi umpan balik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi perbaikan.

Selain Upaya Perbaikan itu, untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Capaian Kinerjanya sudah 100% atau bahkan lebih, Kecamatan Parangin minimal akan mempertahankan pencapaian tersebut dan berupaya untuk lebih meningkatkan sisi kualitasnya.

Parangin, 15 Februari 2025
CAMAT PARINGIN

HUDI DARMAWAN. M.I.P
NIP. 19860427 200412 1 001

LAMPIRAN





